**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Teori**
2. **Proses Belajar-Mengajar**

Menurut Moh. Uzer Usman (1994: 1), mengemukakan bahwa :

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Interaksi dalam peristiwa belajar mengajar mempunyai arti yang lebih luas, tidak sekadar hubungan antara guru dan siswa, tetapi berupa interaksi edukatif. Dalam hal ini bukan hanya penyampaian pesan berupa materi pelajaran, melainkan penanaman sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar.

Menurut Abin Syamsudin (2000: 156) mengemukakan bahwa proses belajar mengajar dapat diartikan sebagai suatu rangkaian interaksi antara siswa dan guru dalam rangka mencapai tujuannya. Dari pengertian-pengertian proses belajar tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses belajar mengajar terdapat interaksi antara siswa yang belajar dan guru sebagai yang mengajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran tertentu.

Belajar merupakan komponen yang paling penting dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga tanpa proses belajar maka makna pendidikan tidaklah utuh. Arthur T. Jersild dalam Syaiful Sagala (2011: 12), menyatakan bahwa belajar adalah “*modification of behavior through experience and training”* yaitu perubahan atau membawa akibat perubahan tingkah laku dalam pendidikan karena pengalaman dan latihan atau karena mengalami latihan. Kemudian Lester D. Crow dalam Syaiful Sagala (2011: 13), mengemukakan bahwa belajar ialah upaya untuk memperoleh kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap-sikap.

Robert M. Gagne dalam Syaiful Sagala (2011: 17) mengemukakan bahwa:

Belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia yang terjadi setelah belajar secara terus menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses perrtumbuhan saja. Belajar merupakan kegiatan yang kompleks, dan hasil belajar berupa kapabilitas, timbulnya kapabilitas disebabkan: (1) stimulasi yang berasal dari lingkungan; dan (2) proses kognnitif yang dilakukan yang dilakukan oleh pelajar. Setelah belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai.

Menurut Nana Sudjana (1989: 5) belajar adalah proses yang aktif, suatu fungsi dari keseluruhan lingkungan di sekitarnya. Belajar berbeda dengan pertumbuhan kedewasaan, dimana perubahan yang terjadi dalam individu berasal dari bawaan genetiknya. Perubahan tingkah laku individu sebagai hasil belajar ditunjukkan dalam berbagai aspek seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, persepsi, motivasi, atau gabungan dari aspek-aspek tersebut.

Dari beberapa pengertian belajar di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya. Perubahan yang dimaksud berarti bahwa seseorang setelah mengalami suatu proses belajar, akan mengalami perubahan tingkah laku, maupun aspek sikapnya. Misalnya dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari ragu-ragu menjadi yakin, dari tidak sopan menjadi sopan. Kriteria keberhasilan dalam belajar diantaranya ditandai dengan terjadinya perubahan tingkah laku pada diri individu yang belajar.

Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab moral yang cukup berat. Berhasilnya pendidikan pada siswa sangat bergantung pada pertanggung jawaban guru dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Wina Sanjaya (2006: 96), mengajar secara deskriptif dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru kepada siswa. Dalam konteks ini sering juga dianggap sebagai proses mentransfer ilmu. Sedangkan menurut Smith dalam Wina Sanjaya (2006: 96), mengajar adalah menanamkan pengetahuan atau keterampilan (*teaching is imparting knowledge or skill)*.

Dari beberapa pengertian mengajar diatas dapat disimpulkan bahwa mengajar adalah suatu proses transfer informasi, berupa penanaman pengetahuan atau keterampilan dan seorang guru terhadap siswanya. Mengajar merupakan suatu perbuatan atau pekerjaan yang unik tetapi sederhana. Dikatakan unik karena ia berkenaan dengan manusia yang belajar, yakni siswa dan yang mengajar yakni guru, dan bertalian erat dengan manusia di dalam masyarakat yang kesemuanya menunjukkan keunikan. Dikatakan sederhana karena mengajar dilaksanakan dalam keadaan praktis dalam kehidupan sehari-hari, mudah dihayati oleh siapa saja.

1. **Hasil Belajar**

Menurut Good dalam Sukardi (1973: 214-215) mengemukakan bahwa :

*“Grade are symbols that represent a value judgement concerning the relative quality of student achievements during specific periods of instruction*”. Grade adalah simbol (angka, huruf, atau kata) yang menggambarkan nilai pertimbangan yang berkaitan dengan kualitas siswa dalam berprestasi selama periode pengajaran. Grade atau nilai akhir memiliki arti yang sangat penting karena nilai akhir tersebut dapat menentukan apakah siswa dikatakan pandai atau tidak. Grade hasil belajar akhir yang didasarkan atas tingkah laku dan penampilan yang terarah dalam tes yang terorganisasi dengan baik, memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding dengan grade yang hanya didasarkan atas tes kertas dan pena saja.

Menurut Nana Sudjana (2011: 22), hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup kognitif, afektif, dan psikomotor.

Menurut Surya, <http://www.sarjanaku.com/2011/03/pengertian-definisi-hasil-belajar.html> diakses pada tanggal 29 September 2012, mengemukakan bahwa :

Hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa berkat adanya usaha atau fikiran yang mana hal tersebut dinyatakan dalam bentuk penguasaan, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga nampak pada diri indivdu penggunaan penilaian terhadap sikap, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga nampak pada diri individu perubahan tingkah laku secara kuantitatif.

Berdasarkan pengertian-pengertian hasil belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya hasil belajar adalah segala pencapaian yang diperoleh seorang siswa atas proses belajar yang telah dijalaninya, yang pada akhirnya dapat teraktualisasi dalam bentuk perubahan sikap dan tingkah laku dari siswa itu sendiri.

Nana Sudjana (2011: 22) mengemukakan bahwa beberapa tokoh membedakan hasil belajar ke dalam beberapa kategori, antara lain :

1. Howard Kingsley membagi hasil belajar ke dalam tiga macam, yaitu :
2. Keterampilan dan kebiasaan
3. Pengetahuan dan pengertian
4. Sikap dan cita-cita
5. Robert M. Gagne, membagi lima kategori hasil belajar, yaitu :
6. Informasi verbal
7. Keterampilan intelektual
8. Strategi kognitif
9. Sikap
10. Keterampilan motoris
11. Bloom, membagi hasil belajar ke dalam tiga kategori, yaitu
12. Ranah kognitif
13. Ranah afektif
14. Ranah psikomotor

Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, kategori hasil belajar yang digunakan adalah kategori Bloom, yang membagi penilaian ke dalam tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor.

1. **Kewarganegaraan**

Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara (Winarno, 2007: 49). Menurut memori penjelasan dari pasal II Peraturan Penutup Undang-Undang No. 62 Tahun 1985 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan.

Menurut Tharra ([http://tharra.wordpress.com/2010/02/24/ pengertian-dan-pendidikan-kewarganegaraan/](http://tharra.wordpress.com/2010/02/24/%20pengertian-dan-pendidikan-kewarganegaraan/), diakses pada tanggal 18 September 2012) :

Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan.

Adapun menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis
2. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum anatara orang-orang dengan negara.
3. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosionak, seperti ikartan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air.
4. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil
5. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarga-negaraan berada pada hukum publik.
6. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan hubungan antara negara dengan seseorang yang tinggal pada suatu wilayah negara tertentu, lengkap dengan berbagai hak dan kewajibannya.

1. **Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)**

M. Numan Somantri (2001 : 299), mengemukakan bahwa :

Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis , analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan menurut UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 dalam M. Numan Somantri, (2001: 154) dijelaskan bahwa :

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Pada jenjang pendidikan tinggi, pendidikan bela negara diselenggarakan antara lain melalui pendidikan kewiraan.

Sapriya (2011: 3) mengemukakan bahwa, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang studi yang bersifat multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan. Bila dikaitkan dengan pendidikan IPS, M. Numan Somantri (2001: 159), menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah seleksi dan adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai salah satu tujuan Pendidikan IPS.

Dari beberapa pengertian PKn di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara.

1. **Visi Misi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)**

Nurul Zuriah (2011: 148-149), mengemukakan bahwa :

Dalam kurikulum standar nasional PKn untuk pendidikan dasar dan menengah disebutkan bahwa visi PKn adalah mewujudkan proses pendidikan yang terarah pada pengembangan kemampuan individu sehingga menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab yang pada gilirannya mampu mendukung berkembangnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Sedangkan misi yang diemban mata pelajaran PKn adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan kenyataaan dan kecenderungan masyarakat yang semakin transparan, tuntutan kendali mutu yang semakin mendesak dan proses demokratisasi yang semakin intens dan meluas sebagai konteks dan orientasi pendidikan demokrasi.
2. Memanfaatkan substansi berbagai disiplin ilmu yang relevan sebagai wahana pedagogis untuk menghasilkan dampak intruksional dan pengiringnya berupa wawasan, disposisi, dan keterampilan kewarganegaraan sehingga dihasilkan desain kurikulum yang bersifat interdisipliner.
3. Memanfaatkan berbagai konsep, prinsip, dan prosedur pembelajaran yang memungkinkan para peserta didik mampu belajar demokrasi dalam situasi yang demokratis dan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat yang lebih demokratis.

Kansil (2005: 15) mengemukakan bahwa pembelajaran di berbagai tingkat pendidikan pada dasarnya memiliki visi, misi dan tujuan yang hampir sama. Yang membedakan adalah kedalaman materi dan proses transfer ilmunya. Berikut ini visi dan misi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

1. Visi mata kuliah kewarganegaraan adalah sebagai bagian dari kelompok MPK di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan pribadinya.
2. Misi mata kuliah kewarganegaraan sebagai bagian dari kelompok MPK di perguruan tinggi bertujuan membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggungjawab kemanusiaan.

Berdasarkan visi misi tersebut di atas, PKn bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia sehingga memiliki wawasan, disposisi, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai yang memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1. **Materi Sistem Pemerintahan Pusat**

Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar kelas IV (penyusun : Opih Priyatna, dkk, diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Jakarta pada tahun 2009, penyusun : Sri Nuryani, dk. Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Jakarta pada tahun 2009)

**SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT**

****

1. **Negara dan Pemerintahan Pusat**

Negara adalah sebuah perkumpulan orang banyak atau organisasi besar yang mempunyai wewenang tinggi. Wewenang itu ditujukan untuk mengatur kehidupan anggotanya, sehingga mereka dapat hidup tenteram, damai, dan sejahtera, serta tercapai cita-citanya. Sebuah negara terbentuk karena keinginan para anggotanya, dalam hal ini adalah rakyat. Jadi rakyatlah yang menginginkan terbentuk atau berdirinya sebuah negara. Suatu organisasi atau kelompok sosial dalam satu wilayah bisa dikatakan sebuah negara bila mempunyai unsur-unsur pokok. Unsur-unsur pokok sebuah negara itu meliputi rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain.

1. **Rakyat**

Rakyat adalah semua orang yang berdiam atau menjadi penduduk di dalam suatu negara.

1. **Wilayah atau Daerah**

Wilayah atau daerah adalah tempat menetapnya rakyat dan tempat dijalankannya roda pemerintahan. Luas wilayah suatu negara tidak ada batasan, bisa luas dan bisa sempit. Negara yang memiliki wilayah luas contohnya Indonesia, sedangkan negara yang memiliki wilayah sempit contohnya Singapura. Wilayah suatu negara bisa meliputi daratan, lautan, dan udara.

1. **Pemerintahan yang Berdaulat**

Pemerintahan yang berdaulat adalah pemerintahan yang ditaati dan dilaksanakan semua peraturannya oleh seluruh rakyatnya dan dihormati oleh negara-negara lain.

**4) Pengakuan dari Negara Lain**

Pengakuan dari negara lain adalah pernyataan dari negaranegara di dunia atas keberadaan negara itu.

Pemerintah adalah gabungan semua alat perlengkapan atau perangkat negara. Perangkat negara itu terdiri atas badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Badan atau lembaga-lembaga pemerintah itulah yang memiliki kedaulatan atau wewenang tinggi untuk menjalankan, mengatur, dan mengurus negara. Pemerintah harus ditaati oleh semua rakyat yang ada di wilayah sebuah negara tanpa terkecuali.

Pemerintah menjalankan roda pemerintahannya untuk kepentingan semua rakyat. Di negara kita, pemerintahan dibedakan menjadi dua, yaitu pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Pemerintah pusat terdiri atas perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi beberapa lembaga tinggi negara, yaitu lembaga eksekutif yang dipegang dan dijalankan oleh presiden dan wakil presiden, lembaga legislatif yang meliputi MPR, DPD, dan DPR, serta lembaga yudikatif yang meliputi Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Presiden dalam menjalankan fungsi eksekutifnya dibantu oleh para menteri atau dewan menteri yang disebut kabinet.

Itulah susunan pemerintah pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah UUD 1945 mengalami perubahan karena diamandemen, maka susunan lembaga pemerintahan pusat pun mengalami perubahan. Untuk mengenal lebih jauh susunan lembaga pemerintahan pusat sebelum dan sesudah UUD 1945 diamandemen, amati bagan kelembagaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berikut ini!





1. **Lembaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**

Pemerintah pusat sebuah negara yang ideal terdiri atas lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Ketiga lembaga ini bekerja sama untuk menjalankan pemerintahan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat.

1. **Lembaga Legislatif**

Lembaga legislatif adalah lembaga yang berwenang membuat dan menetapkan undang-undang. Dalam membuat undang-undang, lembaga legislatif bisa bekerja sama dengan lembaga eksekutif. Apabila sebuah undang-undang sudah ditetapkan oleh lembaga legislatif, maka lembaga eksekutif harus dapat menjalankannya. Lembaga legislatif di Indonesia terdiri atas MPR, DPR, dan DPD.

1. **MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)**

MPR merupakan salah satu lembaga legislatif Indonesia. MPR juga merupakan salah satu lembaga tinggi Indonesia. Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi Indonesia. Sekarang, setelah UUD 1945 diamandemen, MPR merupakan lembaga tinggi legislatif negara yang kedudukannya sejajar dengan DPD dan DPR.

Lembaga MPR ada dan terbentuk berdasarkan UUD 1945. Anggota MPR merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Para anggota MPR bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Jumlah anggota MPR adalah 700 orang. Mereka terdiri atas 500 orang anggota DPR, 135 orang utusan daerah, yaitu lima orang wakil dari setiap daerah Tingkat I, dan 65 orang utusan golongan. Lembaga MPR mengadakan sidang atau rapat sedikitnya sekali dalam lima tahun. Sebelum terjadi perubahan UUD 1945, tugas pokok MPR adalah: 1) menetapkan UUD 1945; 2) menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara; 3) memilih presiden dan wakil presiden.

Setelah diadakan perubahan terhadap UUD 1945 melalui amandemen, tugas pokok MPR adalah: 1) menetapkan dan mengubah UUD 1945; 2) melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden sesuai dengan UUD 1945.

**b) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang sangat penting dalam lembaga kenegaraan Indonesia. Anggota DPR merupakan perwakilan langsung dari rakyat. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali. Warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun keatas dapat memberikan suaranya pada pemilihan umum untuk memilih anggota DPR. Jumlah anggota DPR pusat sebanyak 500 orang. Tidak semua anggota DPR adalah hasil pemilihan umum. Sebanyak 462 anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Sisanya sebanyak 38 orang berasal dari Tentara Nasional Indonesia. Anggota DPR melakukan sidang paling sedikit setahun sekali.

Dalam masa sidang DPR ada yang disebut *masa reses*, yaitu masa istirahat. Masa reses ini biasanya dipergunakan oleh anggota DPR untuk melakukan kunjungan ke berbagai wilayah. Dalam kunjungannya itu, anggota DPR bertemu dengan rakyat dan berbincang-bincang mengenai berbagai masalah yang ada. Hasil dari kunjungan tersebut akan dijadikan bahan untuk dibicarakandalam sidang selanjutnya. DPR sebagai lembaga tinggi negara Republik Indonesia dilengkapi dengan tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang DPR adalah membuat undang-undang dan membahasnya bersama-sama dengan presiden. Undang-undang yang telah ditetapkan merupakan hasil musyawarah dan persetujuan bersama antara DPR dan presiden. Undang-undang merupakan peraturan yang menyangkut kepentingan hidup rakyat banyak yang harus dijalankan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Misalnya Undang-Undang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Otonomi Daerah, dan lain sebagainya.

DPR bersama-sama dengan pemerintah bertugas membuat undang-undang. DPR juga bertugas menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kemudian mempertimbangkannya bersama-sama dengan presiden. Tugas DPR lainnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945, undang-undang, dan peraturanperaturan pemerintah. Sebagai lembaga tinggi negara, DPR dilengkapi dengan beberapa hak, antara lain; 1) hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat tentang kebijakan yang dibuat; 2) hak angket, yaitu hak untuk mengadakan penyelidikan jika terjadi suatu masalah dalam pemerintah pusat atau anggota dewan; 3) hak menyatakan pendapat yang berhubungan dengan kinerja pemerintah pusat;

**c) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**

Setelah diadakan perubahan terhadap UUD 1945 dan dilaksanakannya Pemilihan Umum Tahun 2004, susunan lembaga tinggi negara kita mengalami penambahan lembaga baru. Lembaga itu diberi nama Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah provinsi. Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum. Pembentukan lembaga DPD dimaksudkan sebagai lembaga penyeimbang yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.

Dewan Perwakilan Daerah mempunyai fungsi: (1) memberikan usulan, pertimbangan, dan ikut dalam pembahasan yang berkaitan dengan bidang pembuatan undang-undang; (2) melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan wakil-wakil dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan lima tahun sekali. Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun yang berakhir bersamaan dengan saat pelantikan atau pengucapan sumpah jabatan anggota DPD yang baru. Wakil dari setiap provinsi di DPD adalah empat orang. Seperti lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, Dewan Perwakilan Daerah mempunyai tugas dan wewenang.

Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah antara lain sebagai berikut: (1) Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; (2) Memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang APBN dan rancangan UU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; (3) Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; (4) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; (5) Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Setiap anggota DPD juga merupakan anggota MPR. Walaupun DPD dan DPR sama-sama merupakan lembaga tinggi negara dan lembaga perwakilan, akan tetapi masing-masing memiliki perbedaan, DPR merupakan lembaga penyalur aspirasi politik rakyat Indonesia, sedangkan DPD merupakan lembaga penyalur aspirasi keragaman daerah. DPD dan DPR sama-sama bekerja untuk membuat undang-undang. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas lembaga DPD sehari-hari, dibentuklah kantor DPD yang diberi nama Sekretariat Jenderal DPD yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden. Para pegawai kantor DPD terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Kantor DPD dikepalai oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul pimpinan DPD.

**2) Lembaga Eksekutif**

Lembaga eksekutif adalah lembaga yang berwenang melaksanakan atau menjalankan roda pemerintahan dalam sebuah negara. Pemimpin pelaksana pemerintahan di Indonesia adalah presiden. Di Indonesia, presiden selain sebagai kepala pemerintahan juga sebagai kepala negara. Presiden merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam susunan pemerintahan di Indonesia.

**a) Presiden**

Presiden adalah kepala pemerintahan tertinggi. Menurut UUD 1945, masa jabatan seorang presiden adalah lima tahun. Presiden dapat dipilih kembali pada masa pemilihan berikutnya. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Setiap warga negara Indonesia keturunan asli dapat mencalonkan diri sebagai presiden, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Tugas utama presiden adalah :

1. memimpin rakyat Indonesia untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam segala bidang, agar semua warga negara dapat hidup aman, tenteram, makmur, dan sejahtera.
2. melaksanakan dan membuat undang-undang dengan persetujuan DPR, serta menyusun dan membuat APBN bersama-sama DPR.
3. membuat Keputusan Presiden atau peraturan pemerintah sesuai dengan UUD 1945 atau undang-undang lainnya.

Wewenang atau kekuasaan presiden antara lain :

1. memegang kekuasaan tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia (TNI). Jadi, presiden berkuasa untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan menyatakan negara dalam keadaan bahaya.
2. membuat perjanjian dengan negara lain. Karena itu, presiden berkuasa mengangkat seseorang menjadi wakil negara Indonesia untuk ditempatkan di negara lain. Perwakilan itu disebut duta besar atau konsul, sedangkan lembaganya adalah kedutaan besar.
3. Presiden juga berwewenang untuk memberikan a) grasi adalah ampunan yang diberikan oleh presiden kepada orang yang telah dijatuhi hukuman, b) amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu, c) abolisi adalah peniadaan peristiwa pidana, d) rehabilitasi adalah pemulihan nama baik pada seseorang atau kelompok orang yang telah dinyatakan bersalah karena tidak bersalah, e) memberikan gelar, f) tanda jasa, dan g) tanda kehormatan lainnya atas persetujuan DPR.

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tugas presiden amat berat. Di Istana Merdeka, presiden melakukan tugas-tugas kenegaraan, seperti menerima tamu-tamu dari negara-negara sahabat. Bahkan, presiden harus pergi ke luar negeri untuk melakukan kunjungan atau memenuhi undangan pertemuan dengan negara-negara di dunia dalam rangka meningkatkan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat. Presiden juga mengunjungi berbagai tempat di wilayah Indonesia. Kunjungan ini pun berhubungan dengan tugas kenegaraan presiden, yaitu untuk melihat hasil pembangunan yang sudah atau sedang dijalankan oleh pemerintah. Presiden berbincang-bincang langsung dengan rakyat mengenai masalah yang ada di masyarakat, seperti tentang pelaksanaan pemerintahan, penerapan hukum, dan sebagainya.

**b) Wakil Presiden**

Tugas utama wakil presiden adalah membantu presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selain itu, jika sewaktu-waktu presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan, maka wakil presiden harus menggantikan kedudukan presiden sampai habis masa jabatannya. Tugas dan tanggung jawab wakil presiden sama beratnya dengan tugas dan tanggung jawab presiden.

**c) Menteri**

Dalam melaksanakan tugasnya, selain dibantu oleh wakil presiden, presiden juga mengangkat sejumlah orang untuk dijadikan menteri. Presiden memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan para menterinya. Hak istimewa yang dimiliki presiden tersebut dinamakan *hak prerogratif*.

Menteri adalah orang-orang yang diangkat oleh presiden untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas-tugasnya. Masa jabatan seorang menteri tidak tentu, tergantung kebijakan presiden. Setiap orang bisa diangkat menjadi menteri asal mempunyai kemampuan dan keahlian.

Menteri sebagai pembantu presiden jumlahnya cukup banyak, sesuai dengan kebutuhan. Kelompok atau susunan para menteri ini disebut *kabinet* atau *dewan menteri*. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Oleh karena itu sistem kabinet yang dianut oleh pemerintah Indonesia adalah sistem kabinet presidensial. Selain kabinet presidensial, ada juga negara yang menerapkan sistem kabinet parlementer. Dalam sistem kabinet parlementer, para menterinya diangkat dan bertanggung jawab kepada parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Ciri dari kabinet parlementer adalah adanya menteri utama atau yang disebut Perdana Menteri. Contoh negara yang menganut sistem kabinet parlementer ini adalah negara tetangga kita Malaysia dan Singapura.

Dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia, menteri dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu menteri departemen, menteri negara, dan menteri koordinator. Menteri departemen adalah menteri yang memimpin sebuah departemen. Departemen adalah lembaga pemerintahan yang mengurus suatu bidang pekerjaan yang dipimpin oleh seorang menteri yang sekaligus sebagai pelaksana pemerintahan. Oleh karena itu, kamu pasti mengenal adanya Departemen Pendidikan, Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, dan masih banyak lagi.

Menteri negara adalah menteri yang menangani bidang khusus yang tidak ditangani oleh menteri departemen. Bidang-bidang ini muncul sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Bidang-bidang tersebut antara lain bidang pemberdayaan perempuan, bidang komunikasi dan informatika, bidang pemuda dan olahraga, dan lain-lain. Menteri koordinator adalah menteri yang bertugas untuk menghubungkan atau melakukan kerja sama antara satu menteri dengan menteri lainnya. Terutama di antara menteri yang bidang garapannya dekat dan saling berhubungan. Sebagai contoh, Menteri Koordinator Perekonomian melakukan kerja sama dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, dan Menteri Luar Negeri. Dengan melakukan kerja sama, maka tugas para menteri dapat diselesaikan dengan baik.

Peraturan-peraturan yang dibuat juga bisa saling mendukung dan tidak bertabrakan. Misalnya kerja sama dalam menyusunperaturan pelaksanaan ujian nasional antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Agama. Menteri memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Menteri adalah tangan kanan presiden. Keberhasilan pelaksanaan tugas seorang menteri juga merupakan keberhasilan presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Umpamanya, Menteri Pendidikan Nasional berhasil menjalankan dan mengawasi pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun bagi anak-anak Indonesia. Ini berartikeberhasilan juga bagi presiden dalam melaksanakan program wajib belajar sembilan tahun di Indonesia.

**3) Lembaga Yudikatif**

Lembaga yudikatif adalah lembaga yang berwenang menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat. Sebelum adanya perubahan terhadap UUD 1945, lembaga yudikatif hanya terdiri atas Mahkamah Agung. Tetapi setelah ada perubahan, maka selain Mahkamah Agung, lembaga legislatif ditambah dengan lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

**a) Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Mahkamah Agung terlepas dari pemerintah atau tidak bisa dipengaruhi oleh pemerintah. Mahkamah Agung menjalankan dan melaksanakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan bagi semua warga Indonesia. Tugas utama Mahkamah Agung adalah mengawasi peradilan yang dijalankan oleh pengadilan-pengadilan negeri di seluruh wilayah Indonesia. Mahkamah Agung akan bekerja apabila sebuah perkara hukum tidak bisa diselesaikan oleh pengadilan negeri di daerah. Mahkamah Agung juga akan bekerja bila seseorang yang terkena tuntutan hukum merasa tidak puas, dan meminta perkaranya naik banding ke Mahkamah Agung.

**b) Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga tinggi negara yang ada setelah adanya amandemen UUD 1945. Wewenang atau kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tugas Mahkamah Konstitusi adalah mengawasi pelaksanaan UU yang diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika ada UU yang dianggap tidak adil atau tidak disukai oleh masyarakat, maka masyarakat dapat mengadukannya ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan membahas tuntutan masyarakat dan meninjau kembali UU tersebut. Jika ternyata UU tersebut membuat ketidakadilan bagi masyarakat atau bertentangan dengan peraturan lain, seperti UUD 1945, maka UU itu dapat ditarik kembali atau dibatalkan.

Selain itu, wewenang Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan pembubaran partai politik dan perselisihan tentang hasil pelaksanaan pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi juga wajib memberi putusan atas dasar pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut UUD 1945. Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan orang hakim konstitusi. Sembilan orang hakim konstitusi itu meliputi seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh anggota Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan oleh presiden. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi menjabat selama lima tahun. Mereka dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan berikutnya. Hakim konstitusi diajukan oleh presiden tiga orang, oleh DPR tiga orang, dan oleh Mahkamah Agung tiga orang.

**c) Komisi Yudisial**

Seperti halnya Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial adalah lembaga tinggi negara yang ada setelah amandemen UUD 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Komisi Yudisial juga berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Jadi, Komisi Yudisial berfungsi untuk mengawasi proses pengangkatan hakim agung serta hakim-hakim lain di dalam pengadilan, dengan tujuan mendapatkan hakim-hakim yang baik, jujur, adil di dalam menegakkan hukum di atas kepentingan perorangan ataupun kelompok. Komisi yudisial terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota dengan masa jabatan selama lima tahun.

**4) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah salah satu kelengkapan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memakmurkan dan menyejahterakan kehidupan rakyatnya. Untuk itu, pemerintah melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional membutuhkan dana. Dana diperoleh pemerintah dari penerimaan pajak dan perdagangan luar negeri. Dana yang diperoleh kemudian dipakai untuk biaya pembangunan nasional. Namun, bagaimana kita tahu bahwa uang tersebut telah dikelola dengan baik oleh pemerintah? Oleh karena itu, semua penerimaan dan pengeluaran uang negara perlu diawasi. Sudahkah dana tersebut dikelola dengan benar? Atau jangan-jangan dicuri atau malah dipakai untuk hal-hal lain yang tidak bermanfaat bagi rakyat. Sedangkan rakyat tidak bisa secara langsung mengawasi penerimaan dan pengeluaran uang negara.

Untuk tugas itu, dibentuklah suatu lembaga negara yang anggotanya terdiri atas para ahli yang bertugas memeriksa keuangan negara. Lembaga tinggi negara ini diberi nama Badan Pemeriksa Keuangan. Anggota lembaga BPK dipilih oleh DPR dengan pertimbangan dari DPD. Lembaga BPK merupakan lembaga independen atau bebas. Artinya, kedudukan BPK terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah atau lembaga lainnya. Sehingga anggota lembaga BPK dapat bekerja dengan tenang, jujur, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Jika lembaga ini tunduk kepada pemerintah atau badan lain, tidak mungkin lembaga ini dapat melakukan kewajibannya dengan baik dan benar. Tugas utama Badan Pemeriksa Keuangan meliputi: (a) memeriksa pengelolaan keuangan negara; (b) memeriksa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hasil pekerjaan Badan Pemeriksa Keuangan akan dilaporkan ke DPR, DPD, dan DPRD untuk ditindaklanjuti.

1. **Peta Konsep**

Rose dan Nicholl (2002: 136) dalam Novrianti (<http://sweetyhome.wordpress.com/2008/06/13/peta-konsep/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2012) menyebutkan bahwa: Peta konsep atau peta pembelajaran adalah cara dinamik untuk menangkap butir-butir pokok informasi yang signifikan. Mereka menggunakan format global atau umum, yang memungkinkan informasi ditunjukkan dalam cara mirip seperti otak kita berfungsi-dalam pelbagai arah secara serempak.

Anwar Holil (<http://anwarholil.blogspot.com/2008/04/peta-konsep-untuk-mempermudah-konsep.html>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2012), mengemukakan, bahwa :

Peta konsep merupakan salah satu bagian dari strategi organisasi. Strategi organisasi bertujuan membantu pembelajar meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan organisasi bertujuan membantu pembelajar meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan baru, terutama dilakukan dengan mengenakan struktur-struktur pengorganisasian baru pada bahan-bahan tersebut. Strategi-strategi organisasi dapat terdiri dari pengelompokan ulang ide-ide atau istilah-istilah atau membagi ide-ide atau istilah-istilah itu menjadi subset yang lebih kecil. Strategi- strategi ini juga terdiri dari pengidentifikasian ide-ide atau fakta-fakta kunci dari sekumpulan informasi yang lebih besar.

Menurut Bermawie Munthe (2009: 11) mengemukakan bahwa peta konsep menampilkan satu gambar tentang konsep-konsep materi yang tersusun sesuai dengan tabiat ilmu pengetahuan itu sendiri, tanpa mengindahkan urutan atau *sequence* topik bahasan yang diinginkan.

Anwar Holil (<http://anwarholil.blogspot.com/2008/04/peta-konsep-untuk-mempermudah-konsep.html>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2012), mengemukakan, bahwa :

George Posner dan Alan Rudnitsky dalam Nur (2001: 36) menyatakan bahwa peta konsep mirip peta jalan, namun peta konsep menaruh perhatian pada hubungan antar ide-ide, bukan hubungan antar tempat. Peta konsep bukan hanya meggambarkan konsep-konsep yang penting melainkan juga menghubungkan antara konsep-konsep itu. Dalam menghubungkan konsep-konsep itu dapat digunakan dua prinsip, yaitu diferensiasi progresif dan penyesuaian integratif. Menurut Ausubel dalam Sutowijoyo (2002: 26) diferensiasi progresif adalah suatu prinsip penyajian materi dari materi yang sulit dipahami. Sedang penyesuaian integratif adalah suatu prinsip pengintegrasian informasi baru dengan informasi lama yang telah dipelajari sebelumnya. Oleh karena itu belajar bermakna lebih mudah berlangsung, jika konsep-konsep baru dikaitkan dengan konsep yang inklusif.

Untuk membuat suatu peta konsep, siswa dilatih untuk mengidentifikasi ide-ide kunci yang berhubungan dengan suatu topik dan menyusun ide-ide tersebut dalam suatu pola logis. Kadang-kadang peta konsep merupakan diagram hirarki, kadang peta konsep itu memfokus pada hubungan sebab akibat.

Bermawie Munthe (2009: 17), mengemukakan desain bahan ajar berdasarkan *concept map* ini memiliki karakteristik yang khas, antara lain :

*Pertama*, ia hanya memiliki konsep-konsep atau ide-ide pokok (sentral, mayor, utama). *Kedua*, ia memiliki hubungan yang mengaitkan antara satu konsep dengan konsep yang lain. *Ketiga*, ia memiliki label yang membunyikan arti hubungan yang mengaitkan antara konsep-konsep. *Keempat*, desain itu berwujud sebuah diagram atau peta yang merupakan satu bentuk representasi konsep-konsep atau materi bahan ajar yang penting.

Anwar Holil (<http://anwarholil.blogspot.com/2008/04/peta-konsep-untuk-mempermudah-konsep.html>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2012), mengemukakan, agar pemahaman terhadap peta konsep lebih jelas, maka Dahar (1988: 153) mengemukakan ciri-ciri peta konsep sebagai berikut:

1. Peta konsep (pemetaan konsep) adalah suatu cara untuk memperlihatkan konsep-konsep dan proposisi-proposisi suatu bidang studi, apakah itu bidang studi fisika, kimia, biologi, matematika dan lain-lain. Dengan membuat sendiri peta konsep siswa “melihat” bidang studi itu lebih jelas, dan mempelajari bidang studi itu lebih bermakna.
2. Suatu peta konsep merupakan suatu gambar dua dimensi dari suatu bidang studi atau suatu bagian dari bidang studi. Ciri inilah yang memperlihatkan hubungan-hubungan proposisional antara konsep-konsep. Hal inilah yang membedakan belajar bermakna dari belajar dengan cara mencatat pelajaran tanpa memperlihatkan hubungan antara konsep-konsep.
3. Ciri yang ketiga adalah mengenai cara menyatakan hubungan antara konsep-konsep. Tidak semua konsep memiliki bobot yang sama. Ini berarti bahwa ada beberapa konsep yang lebih inklusif dari pada konsep-konsep lain.
4. Ciri keempat adalah hirarki. Bila dua atau lebih konsep digambarkan di bawah suatu konsep yang lebih inklusif, terbentuklah suatu hirarki pada peta konsep tersebut.

Bermawie Munthe (2009: 18-19) mengemukakan, bahwa ada beberapa karakteristik terkait teknik mendesain bahan ajar peta konsep, yaitu:

1. Biasanya berstruktur hierarkis dengan lebih inklusif. Dalam struktur tersebut, konsep-konsep *general*  berada di bagian atas, kemudian kurang inklusif, dan diikuti dengan konsep-konsep khusus yang diletakkan di bagian peta.
2. Kata-kata yang menghubungkan selalu ada di atas garis-garis yang menghubungkan konsep-konsep.
3. *Concept map* mengalir dari atas ke bawah halaman. Tanda panah digunakan untuk menunjukkan arah hubungan.
4. Sebuah *concept map* merupakan representasi atau gambaran pemahaman seseorang tentang sebuah masalah (mata pelajaran, topik persoalan).
5. Kekuatan *concept map* berasal dari inter koneksi antarkonsep.
6. Perasaan seseorang mungkin terekspresikan ke dalam sebuah *concept map* dengan memasukkan konsep-konsep yang bernada empati, atau perasaan stres terhadap sebuah konsep, seperti senang, takut, marah dan tertekan, dan sebagainya.

Berdasarkan karakteristik peta konsep yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa peta konsep memiliki karakteristik yang khas, antara lain merupakan suatu skema atau gambar yang bermakna, adanya kata-kata atau garis yang menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, dan membentuk suatu hirarki yang saling berkaitan.

Peta konsep dapat menunjukkan secara visual berbagai jalan yang dapat ditempuh dalam menghubungkan pengertian konsep di dalam permasalahannya. Peta konsep yang dibuat murid dapat membantu guru untuk mengetahui miskonsepsi yang dimiliki siswa dan untuk memperkuat pemahaman konseptual guru sendiri dan disiplin ilmunya. Selain itu peta konsep merupakan suatu cara yang baik bagi siswa untuk memahami dan mengingat sejumlah informasi baru (Arends, 1997: 251).

Bermawi (2009: 18-23) mengemukakan bahwa berkaitan dengan mendesain bahan ajar, teknik *concept* map ini memberikan sejumlah keuntungan antara lain :

* 1. Sesuai dengan tabiatnya, ia akan memberikan visualisasi konsep-konsep utama dan pendukung yang telah terstruktur di dalam otak guru ke dalam kertas dan dapat dilihat secara empiris. Representasi yang ada di atas kertas (baca: peta konsep) adalah satu gambar utuh yang saling berhubungan antara satu konsep/topik/materi dengan konsep/topik/materi yang lain.
  2. Gambar konsep-konsep menunjukkan bentuk hubungan antara satu dengan yang lain: linier, vertikal, satu arah, dua arah, atau dua arah yang bertolak belakang, garis tidak putus yang menunjukkan hubungan intensif, atau garis terputus-putus yang menunjukkan hubungan yang jarang.
  3. *Concept map* memberikan bunyi hubungan yang dinyatakan dengan kata-kata yang menjelaskan bentuk-bentuk hubungan antara satu konsep dengan konsep yang lain, baik itu utama maupun pendukung.

Adapun kelebihan pembelajaran dengan menggunakan peta konsep yang dinyatakan Novak dan Gowin (1984) (<http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2241988-kelebihan-dan-kelemahan-pembelajaranpeta/#ixzz 28vlFl6kS>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2012), adalah sebagai berikut:

1. Bagi Guru
   1. Pemetaan konsep dapat menolong guru mengorganisir seperangkat pengalaman belajar secara keseluruhan yang akan disajikan.
   2. Pemetaan konsep merupakan cara terbaik menghadirkan materi pelajaran, hal ini disebabkan peta konsep adalah alat belajar yang tidak menimbulkan efek verbal bagi siswa dengan mudah melihat, membaca, dan mengerti makna yang diberikan.
   3. Pemetaan konsep menolong guru memilih aturan pengajaran berdasarkan kerangka kerja yang hierarki, hal ini mengingat banyak materi pelajaran yang disajikan dalam urutan yang acak.
   4. Membantu guru meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengajarannya.
2. Bagi Siswa
3. Pemetaan konsep merupakan cara belajar yang mengembangkan proses belajar bermakna, yang akan meningkatkan pemahaman siswa dan daya ingatnya.
4. Dapat meningkatkan keaktifan dan kreativitas berfikir siswa, hal ini menimbulkan sikap kemandirian belajar yang lebih pada siswa.
5. Mengembangkan struktur kognitif yang terintegrasi dengan baik yang akan memudahkan dalam belajar.
6. Dapat membantu siswa melihat makna materi pelajaran secara lebih komprehensif dalam setiap komponen-komponen konsep dan mengenali hubungan.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan mengenai kelebihan peta konsep dapat disimpulkan bahwa setiap hal ada sisi kelebihan dan kelemahannya, begitu pula peta konsep. Kelebihan *concept map* atau peta konsep terletak pada pemahaman yang terwakili di dalam peta konsep yang dihasilkan, proses pembuatan peta konsep dan memfasilitasi satu hubungan yang lebih wajar antara guru dan siswa.

Novak dan Gowin (1984), (<http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2241988-kelebihan-dan-kelemahan-pembelajaranpeta/#ixzz 28vlFl6kS>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2012), mengemukakan tentang kelemahan peta konsep sebagai berikut:

Beberapa kelemahan atau hambatan yang mungkin dialami siswa dalam menyusun peta konsep, antara lain:

* 1. Perlunya waktu yang cukup lama dalam menyusun peta konsep, sedangkan waktu yang tersedia di kelas sangat terbatas.
  2. Sulit menntukan konsep-konsep yang terdapat pada materi yang dipelajari.
  3. Sulit menentukan untuk menghubungkan konsep yang satu dengan konsep yang lain.

Sedangkan kelemahan peta konsep ini, membutuhkan waktu yang cukup lama atau berangsur-angsur dan suasana kelas yang kurang tenang karena setiap mahasiswa berkeinginan untuk melengkapi peta konsep yang ada dipapan tulis, dan menyempurnakan jawaban teman. Selain hal tersebut juga ditemui beberapa kali kebiasaan mahasiswa yang menjiplak peta konsep karya lain, sehingga mengurangi orisinalitas dari ide yang disalurkan.

Ratna Wilis Dahar (2006: 108-109), mengemukakan bahwa ada beberapa langkah yang harus diikuti dalam pembuatan peta konsep, antara lain:

1. Pilihlah suatu bacaan dari buku pelajaran
2. Tentukan konsep-konsep yang relevan
3. Urutkan konsep-konsep itu dari yang paling inklusif ke yang paling tidak inklusif atau contoh-contoh
4. Susunlah konsep-konsep itu di atas kertas, mulai dengan konsep yang paling inklusif di puncak ke konsep yang paling tidak inklusif
5. Hubungkanlah konsep-konsep itu dengan kata atau kata-kata penghubung

Anwar Holil (<http://anwarholil.blogspot.com/2008/04/peta-konsep-untuk-mempermudah-konsep.html>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2012), mengemukakan langkah-langkah menyusun peta konsep sebagai berikut:

1. Memilih suatu bahan bacaan.
2. Menentukan konsep-konsep yang relevan.
3. Mengelompokkan (mengurutkan) konsep-konsep dari yang paling inklusif ke yang paling tidak inklusif.
4. Menyusun konsep-konsep tersebut dalam suatu bagan, konsep-konsep yang paling inklusif diletakkan di bagian atas atau di pusat bagan tersebut. Dalam menghubungkan konsep-konsep tersebut dihubungkan dengan kata hubung. Misalnya “merupakan”, “dengan”, “diperoleh”, dan lain-lain.

Berdasarkan langkah-langkah penyusunan peta konsep yang telah dipaparkan oleh beberapa ahli di atas dapat disimpulkan hal-hal pokok dalam penyusunan peta konsep. Membaca materi atau bacaan yang akan dibuat peta konsep untuk kemudian dipahami dan mengelompokkannya dalam beberapa konsep. Setelah konsep-konsep didapat, maka penyusunan peta konsep akan dilakukan. Sehingga diperoleh suatu peta konsep yang baik dan dapat mewakili suatu materi dengan lebih singkat dan bermakna.

Ratna Wilis Dahar (2006: 110-111), mengemukakan beberapa manfaat peta konsep, antara lain : (1) Menyelidiki apa yang telah diketahui siswa, (2) Mempelajari cara belajar, (3) Mengungkapkan miskonsepsi, dan (4) Alat evaluasi. Sedangkan Bermawie Munthe ada beberapa manfaat *concept map* ditinjau dari beberapa kepentingan pembelajaran. *Pertama, concept map* merupakan representasi secara visual dari ide-ide kunci yang berhubungan. Artinya, *concept map* merupakan satu bentuk diagram atau gambar visualisasi konsep-konsep yang saling berhubungan. *Kedua, concept map* mampu menunjukkan arti hubungan-hubungan tersebut ke dalam bentuk label.

Dari beberapa manfaat yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan peta konsep atau *concept map* peserta didik dapat belajar lebih bermakna, serta dapat menyederhanakan konsep-konsep atau teori-teori yang banyak menjadi lebih sederhana dalam bentuk diagram atau gambar konsep yang saling berhubungan.

**B. Kajian Hasil Penelitian Orang Lain**

1. Hasil penelitian Diana Resikahil tahun 2011.

Diana Resikahil, mahasiswi S2 pada Jurusan Sekolah Dasar dan Pra Sekolah Fakultas Pendidikan Universitas Malang. Dalam sebuah tesis yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Peta Konsep Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas Va SDN Madyopuro 1 Kota Malang”. pada tahun 2011. Permasalahan yang ditemukan penulis adalah bahwa di kelas Va SDN Madyopuro I Kota Malang, guru masih memiliki faktor yang aktif dalam proses belajar mengajar. Hal ini berpengaruh pada proses belajar, aktivitas belajar dan hasil belajar peserta didik yang pada umumnya berada pada KKM dibawah 65.

Menghadapi masalah ini penulis melaksanakan penelitian berupa Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan model Kemmis and Taggart yang terdiri dari tahapan 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) observasi, dan 4) refleksi.

Setelah dilakukan Penelitian Tindakan Kelas ternyata didapatkan hasil yang menunjukkan peningkatan perolehan nilai pada Siklus I pertemuan pertama memperoleh nilai 62,05, pada pertemuan kedua memperoleh nilai 69,5. Pada siklus II rata-rata nilai peserta didik adalah 76,97 dan pada pertemuan yang kedua adalah 87. Selain memperoleh nilai yang meningkat aktivitas belajar siswa juga meningkat.

1. Penelitian Faizul Azmi tahun 2011

Faiqul Azmi, Mahasiswa PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang dalam sebuah skripsi yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Menggunakan Strategi Pembelajaran Peta Konsep Tipe Pohon Jaringan (Network Tree) pada Siswa Kelas VA SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang”, tahun 2011.

Berdasarkan hasil observasi pada awal pembelajaran IPS dari kegiatan PPL 2 di kelas VA SDN Kalibanteng Kidul 01 menunjukkan bahwa banyak permasalahan dalam pembelajaran. Guru dalam pembelajaran masih menggunakan metode konvensional, kurangnya contoh nyata dari guru dalam pembelajaran karena penggunaan media yang kurang optimal, kurang mengikutsertakan siswa sehingga menyebabkan siswa kurang konsentrasi dan bosan pada saat pembelajaran.

Hakikat IPS adalah telaah tentang manusia dan dunianya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupannya, manusia harus menghadapi tantangan-tantangan yang berasal dari lingkungan maupun sebagai hidup bersama. Dengan kata lain bahan kajian IPS adalah manusia dan lingkungannya.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah strategi pembelajaran peta konsep tipe pohon jaringan (network tree) dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS kelas VA SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang?. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS menggunakan strategi pembelajaran peta konsep tipe pohon jaringan (network tree) pada siswa kelas VA SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas menggunakan strategi pembelajaran peta konsep tipe pohon jaringan (network tree) dilaksanakan dalam 3 siklus dan setiap siklusnya terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VA SDN kalibanteng Kidul 01 Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan data kuantitatif dan kualitatif.

Siklus I mendapatkan skor 37, persentase 77% kategori baik. Siklus II mendapatkan skor 41, persentase 85% kategori sangat baik. Siklus III mendapatkan skor 46, persentase 96% kategori sangat baik. (2) Aktivitas siswa meningkat pada siklus I dengan skor 1117, nilai rata-rata 24,82, persentase 62% kategori cukup. Siklus II meningkat dengan skor 1279, nilai rata-rata 28,42, persentase 71% kategori baik. Siklus III meningkat dengan skor 1433, nilai rata-rata 31,84, persentase 80% kategori baik. (3) Hasil belajar siswa meningkat pada siklus I 49% kategori kurang dengan nilai rata-rata 61,6. Siklus II meningkat 71% kategori baik, nilai rata-rata 71,9. Siklus III meningkat mencapai 91% kategori sangat baik dengan nilai rata-rata 80,3.

Kesimpulan dari penelitian ini melalui strategi pembelajaran peta konsep tipe pohon jaringan (network tree) dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Saran dari penelitian ini adalah strategi pembelajaran peta konsep tipe pohon jaringan (network tree) dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS, maka dapat digunakan acuan untuk pelaksanaan pembelajaran yang lainnya.

**C. Kerangka Berpikir**

Peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan metode peta konsep pada pembelajaran PKn tentang Sistem Pemerintahan Pusat di kelas IV SDN Cijerah 6 Kota Bandung Tahun Pelajaran 2012-2013, yang menjadi subjek penelitian ini adalah mengenai hasil belajar tentang sistem pemerintahan pusat.

Penerapan metode peta konsep sebagai alternatif peneliti dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dengan penerapan metode peta konsep di harapkan dapat memberi pengaruh yang baik bagi penulis dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu dapat memberi peningkatan kualitas proses belajar yang lebih bermakna, aktif, kreatif dan inovatif.

Ratna Wilis Dahar (2006 : 106), mengemukakan bahwa :

Peta konsep dikembangkan untuk menggali ke dalam struktur kognitif pelajar dan untuk mengetahui, baik bagi pelajar maupun guru, melihat apa yang telah diketahui pelajar. Walaupun suatu peta konsep tidak diharapkan menjadi suatu representasi konsep dan proposisi relevan yang komplet dari yang diketahui pelajar, tetapi dapat diharapkan bahwa peta konsep merupakan suatu pendekatan yang dapat dilaksanakan yang dapat dikembangkan baik bagi pelajar atau guru secara sadar dan bebas.

Novak mengembangkan teori asimilasi Ausubel dalam penelitiannya tentang siswa pada tahun 1974. Dalam penelitiannya tersebut Novak menghasilkan *concept map* sebagai satu diagram yang berdemensi dua, yaitu analog dengan sebuah peta jalan yang tidak hanya mengidentifikasi butir-butir utama (konsep-konsep), tetapi juga menggambarkan hubungan antarkonsep utama tersebut. Sebagaimana banyaknya kesamaan garis-garis yang menghubungkan antarkota besar yang tergambarkan dengan jalan-jalan utama dan jalan bebas hambatan (Bermawi, 2009: 17).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peta konsep atau *concept map* menitikberatkan pada belajar bermakna peserta didik, di mana peserta didik diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan awal yang mereka miliki dan menghubungkan konsep-konsep baru menjadi suatu pemahaman yang utuh bagi peserta didik.

Suatu proses kegiatan belajar mengajar akan menjadi bermakna bila semua komponen dalam proses tersebut dapat menjalankan perannya masing-masing dengan benar. Dalam hal ini banyak hal yang harus diperhatikan baik dalam menyampaikan materi, pemilihan metode dan model pembelajaran, media yang digunakan, dan hal lain yang terkait. Analisis materi ajar sangat penting bagi seorang guru untuk menentukan langkah selanjutnya dalam merencanakan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Seperti halnya dalam mata pelajaran PKn yang materinya meliputi pemahaman Konsep, Nilai, Moral, dan Norma. Seorang guru harus dapat menentukan metode atau model pembelajaran apa yang sesuai dengan muatan materi yang diajarkan.

Dalam materi Sistem Pemerintahan Pusat yang dibahas pada kelas IV Sekolah Dasar, peserta didik peserta didik mengalami kesulitan karena dituntut untuk memahami konsep Sistem Pemerintahan Pusat dengan benar. Sedangkan materi ini berkaitan dengan fakta yang memiliki ketetapan yang mutlak. Maksudnya, Sistem Pemerintahan Pusat ini hanya akan berubah bila terdapat kebijakan baru dari pemerintah itu sendiri.

Kesulitan yang dialami peserta didik pada materi ini adalah banyaknya konsep yang harus diketahui, diingat dan dipahami, misalnya lembaga-lembaga negara yang ada dalam pemerintahan daerah, kedudukan, tugas dan fungsinya. Peserta didik sering keliru dalam menyebutkannya karena dalam belajarnya hanya dibaca dan dihapalkan, tanpa memahami konsepnya. Seorang guru juga harus cermat dalam memantau segala perubahan kebijakan dan aturan yang berlaku dalam pemerintahan, sehingga informasi yang disampaikan kepada peserta didik *valid* dan *up tp date* dengan kenyataan yang ada.

Segala permasalahan di yang telah diuraikan di atas, harus disikapi dengan mencari jalan keluar bagaimana agar segala kesulitan ini dapat dilewati dan menghasilkan hasil belajar peserta didik yang lebih baik dan bermakna. Mengacu pada karakteristik materi yang membutuhkan pemahaman konsep, maka metode pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan yaitu metode pembelajaran peta konsep. Pada prinsipnya peserta didik dapat menyederhanakan materi yang luas dalam suatu peta konsep, dan diharapkan dengan membuat peta konsep sendiri melalui prosesnya yang bertahap peserta didik dapat memahami materi dengan lebih baik. Adapun hubungan permasalahan diatas dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :

**Hasil**

**Solusi**

**Masalah**

Kurangnya hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran PKn pada materi Sistem Pemerintahan Pusat

Penerapan Metode Peta Konsep

Meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran PKn pada materi Sistem Pemerintahan Pusat

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

**D. Hipotesis Tindakan**

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, diduga melalui penerapan metode peta konsep dapat meningkatkan hasil belajar PKn peserta didik pada pokok bahasan Sistem Pemerintahan Pusat di Kelas IV SDN Cijerah 6.

Lebih jelas penulis merinci hipotesis tindakan sebagai berikut :

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam penerapan metode peta konsep dapat meningkatkan hasil belajar PKn pada pokok bahasan Sistem Pemerintahan Pusat siswa kelas IV SD Negeri Cijerah 6 Kota Bandung.
2. Proses pembelajaran dengan penerapan metode peta konsep dapat meningkatkan hasil belajar PKn pada pokok bahasan Sistem Pemerintahan Pusat siswa kelas IV SD Negeri Cijerah 6 Kota Bandung.
3. Hasil belajar PKn dapat meningkat dengan penerapan metode peta konsep pada pokok bahasan Sistem Pemerintahan Pusat siswa kelas IV SD Negeri Cijerah 6 Kota Bandung.